

EDISI RABU, 03 JULI 2024

HARIAN LENTERA

Inspirasi⁺Perubahan **TODAY**



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

[@lenteratoday](https://www.instagram.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.twitter.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.tiktok.com/@lenteratoday)

[f lentera.tv](https://www.facebook.com/lentera.tv)

[Lentera TV Media](https://www.youtube.com/LenteraTVMedia)

MENANTI JANJI PERETAS PDN BERI KUNCI PEMBUKA ENKRIPSI

Warganet Sebut Settingan, Pakar Duga Pelaku di Dalam Negeri

TERJEMAHAN PERNYATAAN

TERBUKA BRAIN CIPHER

BERIKUT INI TERJEMAHAN DARI

PERNYATAAN PUBLIK BRAIN CIPHER:

"Kami ingin membuat pernyataan terbuka.

Rabu ini, kami akan memberi Anda kuncinya secara gratis. Kami berharap serangan kami menjelaskan kepada Anda betapa pentingnya membiayai industri dan merekrut spesialis yang berkualifikasi.

Serangan kami tidak membawa konteks politik, hanya pentest dengan pasca pembayaran...

Warga negara Indonesia, kami mohon maaf karena hal ini berdampak pada semua orang.

Kami juga mohon terima kasih dan kepastian masyarakat bahwa kami telah mengambil keputusan tersebut secara sadar dan independen.

Jika perwakilan pemerintah, menganggap salah mengucapkan terima kasih kepada hacker. Anda dapat melakukannya secara pribadi di kantor pos".

p.s.

Kami meninggalkan dompet (digital) monero untuk sumbangan, kami berharap pada hari Rabu kami akan mendapatkan sesuatu. (Dan kami ulangi lagi: kami akan memberikan kunci secara gratis dan atas inisiatif kami)

p.s.s

Pada hari Rabu, kami akan kami menepati janji kami.

**Government (Hal.2)
Deretan Usulan
Menko PMK Muhadjir,
Naikkan UKT Maba
hingga Biaya
Tinggi Wisuda**



Kelompok 'hacker', Brain Chiper, yang diduga meretas Pusat Data Nasional (PDN) membuat pengumuman. Pesannya menjadi sorotan di media sosial. Akun perusahaan intelijen siber @stealthmole_int di X mengunggah ulang postingan yang tampak seperti forum dark web. Hacker menyebut bahwa kunci untuk membuka akses enkripsi PDNS 2 ini akan diberikan secara gratis pada Rabu, (3/7/2024) hari ini. Mereka juga meninggalkan pesan agar Indonesia meningkatkan keamanan. Sindiran juga diberikan karena Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Informasi Teknologi (IT) negeri dinilai tak mumpuni. Opini publik pun berkembang. Ada yang menilai kemungkinan peretasan ini hanya settingan agar Kominfo mendapat anggaran tambahan. Soal aktor atau pelaku di balik kelompok peretas tersebut, pakar memprediksi warga domestik alias orang Indonesia sendiri.

Baca di hal
11...

Deretan Usulan Menko PMK Muhadjir Naikkan UKT Maba hingga Biaya Tinggi Wisuda

JAKARTA- Isu terkait mahal biaya kuliah masih terus bergulir. Terbaru usulan-usulan menggelitik diungkapkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

Eks Mendikbud RI ini salah satunya meminta agar perguruan tinggi tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Ia menyarankan, jika kampus ingin menaikkan UKT, sebaiknya dilakukan kepada mahasiswa baru dan setelah itu tidak ada lagi kenaikan.

Hal itu disampaikan dia dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

"Dan saya kemarin sampaikan misalnya, naikan biaya itu jangan serta merta. Jadi naikanlah kepada maba saja, dan itu jangan naik sampai nanti selesai dia, sehingga orang tua punya kepastian. Kalau yang lama biar selesai sampai selesai," kata Muhadjir.

Usulan lain, Muhadjir menyarankan para pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mencari keuntungan dengan menerapkan tarif tinggi dalam seremonial wisuda.

Muhadjir menilai, orang tua mahasiswa tidak akan keberatan dan rela untuk membayar biaya yang tinggi untuk wisuda anaknya.

"Wisuda itu tarik yang tinggi karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapa pun dikasih," ujarnya.

"Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa, tapi harus beli undangan," sambungnya.



(Ilustrasi) Suasana ujian tulis berbasis komputer-seleksi nasional berbasis tes (UTBK-SNBT) (Antara)

Ia pun menyinggung kebijakan kenaikan UKT beberapa waktu lalu yang menuai banyak protes dari berbagai pihak.

"Ketika orang sedang gajinya sudah telat anunya naik pasti lah protes itu. Jadi menurut saya juga momentum kurang pas makanya saya sempat kritik itu," tandas dia.

Dalam raker dengan DPR pada 21 Mei lalu, Mendikbud Nadiem Makarim juga menegaskan bahwa kenaikan UKT hanya untuk mahasiswa baru. "Peraturan UKT baru ini, hanya berlaku kepada mahasiswa baru. Tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi," kata Nadiem kala itu. Namun karena banyaknya protes, kenaikan UKT untuk tahun ini ditunda.

Harusnya Kuliah Gratis

Terpisah, Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menilai biaya uang kuliah tunggal (UKT) di Indonesia

sepatutnya gratis, sebagaimana amanat dari konstitusi.

"Kalau perlu, mahasiswanya gratis, sesuai dengan konstitusi kita," kata Djohar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan sejumlah eks menteri pendidikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan kehadiran negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar serta menjamin tersedianya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Sejalan dengan amanat itu, Djohar

menilai tidak sepatutnya pemerintah dan pihak perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri membebaskan UKT kepada mahasiswa. Sebaiknya, menurut dia, perguruan tinggi negeri memiliki tim penggalang dana (fundraising team) yang bertugas mencari dana penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.

Dana yang digalang, kata dia melanjutkan, dapat diperoleh melalui pengembangan potensi bisnis yang ada di daerah, seperti bisnis tambang.

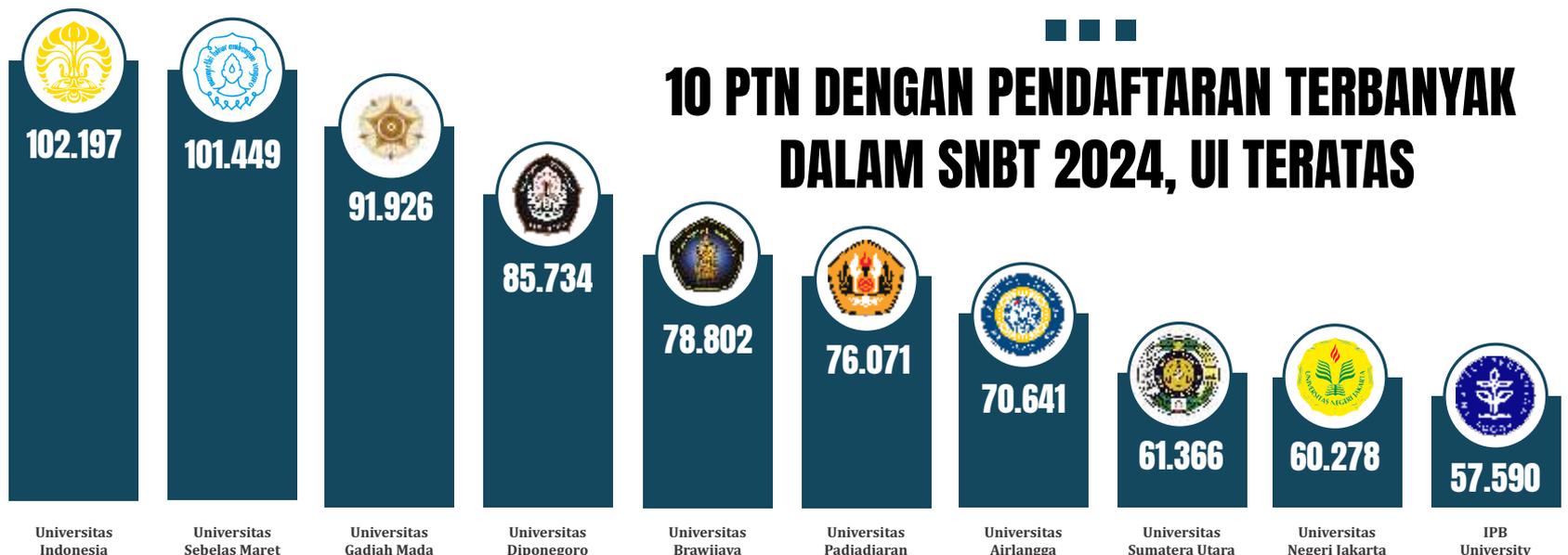
"Banyak sekali hal yang bisa diambil dari daerah sendiri untuk mendapatkan uang. Jangan diambil dari mahasiswa," ujar dia.

Sebelumnya, hal senada telah disampaikan oleh Djohar dalam rapat Panja Pembiayaan Pendidikan, Kamis (27/6). Dia menyampaikan harapannya agar perguruan-perguruan tinggi memiliki dan menjalankan bisnis demi meringankan biaya pendidikan para mahasiswanya.

"Saya harapkan semua perguruan tinggi. Jadi ada tim yang mengurus pendidikan ada, yang ngurus bisnis ada. Jadi, uang kuliah tidak dibebankan ke mahasiswa karena ini melanggar konstitusi. Tidak boleh," kata dia.

Ia mencontohkan, perguruan tinggi dapat menjalankan bisnis sawit ataupun tambang. Meskipun begitu, ia pun mengakui diperlukan peraturan yang memperkuat posisi perguruan tinggi untuk menjalankan berbagai bisnis.

"Kita punya tanah, sawit, kok dikasih ke orang. UNRI (Universitas Riau) tidak punya satu hektare pun kebun sawit, padahal di sekelilingnya kebun sawit. Ada tambang batu bara, emas, nikel, kok perguruan tinggi negeri enggak ngambil ini. Harus kita siapkan peraturan untuk ini," ucap dia. (tri,ist,wis,ant/dya)



DPR Tolak Suntikan Rp 1 Triliun ke Badan Bank Tanah

PENGERTIAN

BADAN BANK TANAH

- Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2021, Badan Bank Tanah atau yang sering disebut dengan Bank Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
- Badan Bank Tanah bertanggung jawab kepada presiden melalui komite. Adapun, komite Bank Tanah adalah Menteri Keuangan, Menteri PUPR, dan Menteri ATR/BPN.

FUNGSI DAN TUGAS

BADAN BANK TANAH

- Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 64 tahun 2021, Badan Bank Tanah memiliki fungsi perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah, dan pendistribusian tanah. Sementara itu, tugasnya yaitu:
 - melakukan perencanaan kegiatan jangka panjang, menengah, dan tahunan
 - melakukan perolehan tanah yang dapat bersumber dari penetapan pemerintah dan pihak lain
 - melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung
 - melakukan pengelolaan tanah dari kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan, dan pengendalian tanah
 - melakukan pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah.

SEBARAN TANAH YANG

DIKELOLA BADAN BANK TANAH

- Sejak berdiri dari 2021, Badan Bank Tanah telah 'menguasai' 18.758 hektare tanah yang ada di Indonesia. Tanah-tanah tersebut tersebar di 29 kabupaten/kota, yaitu:
 - Asahan (Sumatera Utara)
 - Tanjung Balai (Sumatera Utara)
 - Tapanuli Selatan 2 (Sumatera Utara)
 - Tapanuli Selatan (Sumatera Utara)
 - Bangka (Bangka Belitung)
 - Bengkulu (Bengkulu Tengah)
 - Serang (Banten)
 - Cianjur (Jawa Barat)
 - Purwakarta (Jawa Barat)
 - Sumedang (Jawa Barat)
 - Brebes (Jawa Tengah)
 - Brebes 2 (Jawa Tengah)
 - Batang (Jawa Tengah)
 - Kendal (Jawa Tengah)
 - Semarang (Jawa Tengah)
 - Semarang 2 (Jawa Tengah)
 - Jember (Jawa Timur)
 - Tabanan (Bali)
 - Badung (Bali)
 - Badung 2 (Bali)
 - Badung 3 (Bali)
 - Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat)
 - Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat)
 - Sambas (Kalimantan Barat)
 - Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur)
 - Poso (Sulawesi Tengah)
 - Buton (Sulawesi Tenggara)
 - Minahasa Utara (Sulawesi Utara)
 - Halmahera Selatan (Maluku Utara)



JAKARTA - DPR RI tegas menolak suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Bank Tanah sebesar Rp 1 triliun. Keputusan itu juga langsung dikatakan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P mengatakan, pihaknya menolak suntikan PMN tahun 2024 kepada Badan Bank Tanah. Oleh sebab itu, Badan Bank Tanah tidak hadir di Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi XI dengan instansi yang diajukan menerima PMN pada Selasa (2/7/2024).

"Kemarin di Rapat Kerja (Raker bersama Kemenkeu) sudah kita tidak setuju di depan Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati)," ujarnya saat ditemui, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Dolfie mengungkapkan, PMN tahun 2024 sebesar Rp 1 triliun yang diajukan Kemenkeu untuk Badan Bank Tanah dinilai belum ada urgensi yang mendesak. "Alasannya) belum urgent saja, kita dari PMN saja pertimbangannya," ungkap dia.

Sebelumnya, di dalam Raker bersama Kemenkeu pada Senin (1/7/2024), Dolfie menjelaskan bahwa pihaknya meminta klarifikasi dari Badan Bank Tanah terkait PNM yang diberikan di tahun 2022 lalu, pasalnya DPR juga tak menyetujui suntikan tersebut namun Peraturan Pemerintah (PP) tetap dikeluarkan.

"Pada 9 November 2022, kami belum menyetujui PMN Rp 500 miliar saat itu, tapi akhirnya terbit juga PP yang memberikan PMN pada Bank Tanah, ini mohon diklarifikasi dulu," jelasnya.

Dolfie menuturkan, alasan penolakan PMN ke Badan Bank Tanah

karena rekomendasi Komisi XI dari hasil rapat pendalaman yang telah dilakukan tampak tak didengar oleh pemerintah.

"Kami intinya belum dapat menyetujui ketika itu, eh tahu-tahu keluar (PP). Apa gunanya rekomendasi yang kita rapatkan kalau seperti itu," kata Dolfie.

Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu pun mengusulkan untuk menolak persetujuan PMN terhadap Bank Tanah untuk 2024. Selain itu, dia meminta dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait pemberian suntikan PMN bagi Bank Tanah setelah rapat tersebut.

"Untuk Bank Tanah saya usulkan kita keluarkan dari permintaan pendalaman, dalam artian kita tidak setuju untuk dialokasikan di 2024 sebelum clear ini masalah," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemberian PMN untuk Bank Tanah merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang pemberian modal awal. Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa Bank Tanah mendapatkan modal awal senilai Rp 2,5 Triliun.

Untuk itu, Sri Mulyani mengusulkan untuk pemberian PMN tunai bagi Bank Tanah sebesar Rp 1 triliun dan PMN non tunai berupa enam bidang tanah senilai Rp 265 miliar.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, mengusulkan akan memberikan PMN dengan total senilai Rp 6,1 Triliun untuk lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di antaranya PT Hutama Karya (persero) sebesar Rp 1 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai

Rp 2 triliun dan PT Industri Kereta Api (Persero) Rp 965 miliar.

Kemudian, pemerintah akan menggunakan cadangan pembiayaan investasi untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) senilai Rp 500 miliar, dan Badan Bank Tanah senilai Rp 1 triliun.

Hutama Karya Dapat 2 Lahan

Diketahui, PT Hutama Karya (Persero) akan mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai berupa lahan di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten dan Plaju, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).

"Hutama Karya juga direncanakan mendapat PMN Non-Tunai berupa lahan di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten sebesar Rp1,8 triliun dan di Plaju, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sebesar Rp122 miliar," ujar Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Dengan demikian total PMN Non-Tunai berupa lahan yang akan diperoleh Hutama Karya sebesar Rp1,93 triliun.

Untuk lokasi lahan di Karawaci berada di daerah prime area di Lippo Karawaci, sedangkan aset lahan berikutnya berada di Plaju, Sumatera Selatan.

Lahan di Karawaci berupa tanah kosong yang akan diberdayakan oleh Hutama Karya dan dalam hal ini Hutama Karya menjadi master developer, karena luasan lahan di Karawaci tersebut sebesar 17,3 hektare.

Sementara itu, lahan yang berada di Plaju, Sumatera Selatan memiliki luas lahan sebesar 20,1 hektare.

"PMN yang berasal dari Barang Milik Negara ini sebenarnya sudah dibahas, tetapi peraturan pemerintahnya belum keluar. Mudah-mudahan pada tahun ini bisa terbit peraturan pemerintahnya, sehingga bisa kami terima dan memperkuat permodalan kami di bidang properti," ujar Budi Harto.

Manfaat PMN Non-Tunai yakni menciptakan multiplier effect yang mampu meningkatkan perekonomian daerah setempat. Bagi perusahaan, manfaat PMN ini adalah meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan.

Sedangkan manfaat bagi pemerintah adalah menjadikan aset idle menjadi produktif/mengurangi beban pemeliharaan, serta kontribusi fiskal dan pajak. Manfaat bagi masyarakat yakni mengembangkan produk seperti properti dan penciptaan lapangan kerja.(wid,rls,ist,tro/dya)

Suasana lahan pertanian yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau, Desa Ridogalih di Kecamatan Cibarusah, Jawa Barat. (dok.ist)

Pacitan dan Blitar Terancam Darurat Kekeringan

SURABAYA- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi tahun ini akan terjadi kemarau panjang. Sehingga kekeringan berpotensi lebih lama daripada tahun 2023 lalu.

Dua wilayah di Jawa Timur (Jatim) menghadapi ancaman kekeringan yakni Pacitan dan Blitar. Dua daerah itu masuk dalam daftar wilayah terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang berdasarkan asesmen BPBD Jawa Timur (Jatim).

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan wilayah Blitar kini berstatus tanggap darurat. Sedangkan Pacitan sudah mengeluarkan status siaga darurat.

Pemetaan wilayah berstatus kedaruratan itu mulai dilakukan BPBD Jatim sejak awal guna memudahkan petugas dalam melakukan distribusi bantuan dan penanganan dampak kemarau panjang. Salah satunya distribusi air bersih.

"Kalau dropping air bersih saat ini masih pertama mengeluarkan tanggap darurat baru Blitar, tapi di kabupaten lain seperti di Pacitan sudah mengeluarkan siaga darurat belum sampai ke tanggap darurat," kata Gatot di Surabaya, Selasa (2/7/2024).

Gatot menyebut distribusi air bersih masih menjadi fokus utama dalam menangani dampak musim kemarau. Sebab, berkaca dari tahun lalu, ada lebih dari 800 desa terdampak kekeringan di Jatim yang memerlukan air bersih.

"Seperti tahun lalu ada kurang

lebih 800 desa yang memiliki potensi kekeringan air bersih itulah yang kita komunikasikan dengan teman-teman kabupaten/kota kebutuhan yang lebih kongkrit seperti apa dan mana yang didahulukan untuk penanganan tersebut," ujarnya.

Selain memetakan wilayah kekeringan, BPBD Jatim juga mengantisipasi dampak musim kemarau yang lain. Yakni kebakaran lahan. Gatot menyebut salah satu wilayah yang berpotensi terancam kebakaran adalah kawasan Bromo.

"Kami mengimbau masyarakat untuk antisipasi apabila melakukan kegiatan di alam bebas yang bisa menimbulkan api. Ilalang dan rumput ini sangat rentan jika berjatuh bara api yang ditimbulkan oleh rokok terus pembakaran atau pembukaan lahan atau pencarian hewan, cara berburu dengan kayu bakar," pungkasnya.

Kemarau Tak Selalu Kering

Sebelumnya BMKG menyebut musim kemarau tidak selalu kering, karena hujan masih dapat turun, termasuk periode saat ini.

Hal itu terungkap dalam Prospek Cuaca Mingguan Periode 2-8 Juli bertajuk "Kemarau tidak selalu kering; hujan masih berpotensi di musim kemarau."

"Musim kemarau sering dikaitkan dengan cuaca kering dan panas yang panjang, namun dalam beberapa hari terakhir ini beberapa wilayah Indonesia masih diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat

dan bahkan sangat lebat," tulis BMKG.

"Kondisi ini menjadi pengingat bahwa cuaca di negeri ini sangat dinamis sehingga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat berubah dengan cepat," tambahnya.

Analisis dan pantauan BMKG menunjukkan beberapa hari ke belakang sejumlah wilayah masih diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat.

Di antaranya wilayah Boven Digoel, Papua Selatan; Sami, Papua; Pekanbaru, Riau; Pontianak, Kalimantan Barat; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; serta Maluku Tengah, Maluku.

Hujan sendiri diperkirakan masih bakal mengguyur sejumlah wilayah beberapa hari ke depan, salah satunya DKI Jakarta, yang diprediksi sudah masuk musim kemarau sejak Juni.

BMKG mengungkap sejumlah fenomena atmosfer yang memicu peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia ini.

Pertama, gelombang atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO) yang berada pada fase 3 (Indian Ocean) yang berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.

Kedua, aktivitas gelombang atmosfer Rossby Ekuatorial. Ini terpantau aktif di Sumatera, Kalimantan, Jawa, NTB, NTT, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku,

dan Papua Selatan.

Ketiga, gelombang Kelvin yang terpantau di Lampung, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Keempat, sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar Barat dari Sulawesi Barat. Sirkulasi tersebut membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) dan daerah pertemuan angin (konfluensi), yang memicu pembentukan awan hujan. (pra,rls,ant/dya)

BERIKUT DAFTAR WILAYAH YANG BERPOTENSI CUACA ESKTREM SELAMA PEKAN INI:

1. Potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang

- Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT;

- Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara;

- Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

2. Potensi Angin Kencang

- Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Selatan.

Ketua KPU Koreksi Statmen soal Syarat Usia Cagub 30 Tahun Per 1 April 2027, Bukan 1 Januari 2025

KETENTUAN TENTANG PELANTIKAN SERENTAK DALAM UU PILKADA BERBUNYI:

PASAL 164A:

(1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak.

(2) Pelantikan secara serentak sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir.

PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2024

Bagian Ketiga Persyaratan Calon tepatnya Pasal 14 ayat 2 yang berbunyi:

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil

Penegasan soal batas usia kembali dituangkan di pasal 15. Berikut bunyi pasalnya:

Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih.



Ketua KPU Hasyim Asy'ari

JAKARTA-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengoreksi ucapannya soal syarat usia calon kepala daerah tingkat provinsi. Ditegaskannya, calon harus berusia 30 tahun per 1 April 2027.

Sebelumnya, Hasyim menyebut calon gubernur dan calon wakil gubernur harus berusia 30 tahun saat dilantik pada 1 Januari 2025.

"Iya benar (calon kepala daerah harus berusia minimum per 1 April 2027 berdasarkan putusan MK terhadap Pasal 201 ayat 7 UU Pilkada)," kata Hasyim saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2024).

Dalam penjelasan sebelumnya, Hasyim menyebut pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 harus dilakukan pada 1 Januari 2025 berdasarkan 3 kerangka hukum yakni amar putusan MA No. 23 P/HUM/2024 angka 2, Ketentuan tentang Akhir Masa Jabatan di UU Pilkada, dan Ketentuan tentang Pelantikan Serentak.

Ketentuan tentang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 dalam UU Pilkada Pasal 201 ayat (7) menyebutkan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024".

Hasyim menyebut norma pasal tersebut sudah diubah Mahkamah Konstitusi lewat putusan MK No. 27/PUU-XXII/2024 (Putusan dibacakan pada 20 Maret 2024) Angka 2 sehingga menjadi berbunyi: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2027.

"Pelantikan Bupati dan Wakil

Bupati Yalimo sebagai hasil Pilkada 2020 adalah pada 1 April 2022 (pelantikan terakhir paslon terpilih hasil Pilkada 2020)," kata Hasyim.

Berdasarkan fakta tersebut serta ketentuan tentang pelantikan serentak paslon terpilih yang diatur dalam Pasal 164A ayat (1) dan (2) yang masih berlaku sah, maka KPU berkesimpulan pelantikan serentak paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Pilkada 2024 dapat dilakukan setelah 1 April 2027.

"Berdasarkan aturan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, pelantikan serentak paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, dapat dilakukan setelah 1 April 2027, yaitu pada 2 April 2027," tuturnya.

"Iya (usia minimum kepala daerah bukan 1 Januari 2025)," ujarnya. Usia minimum calon bupati/wali kota dan wakilnya adalah 25 tahun, sedangkan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur yakni 30 tahun.

KPU menegaskan, pihaknya tidak ditugaskan untuk menentukan jadwal pelantikan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Jadwal pelantikan kepala daerah itu, ditentukan oleh pihak pemerintah.

"KPU RI sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 164a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Yang menentukan jadwal pelantikan itu adalah pemerintah," kata Komisioner KPU RI Idham Holik, Selasa (2/7/2024).

Dalam persoalan jadwal pelantikan itu, Idham mengaku, KPU sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah. Hingga saat ini, KPU masih menunggu jadwal pelantikan yang akan ditetapkan pemerintah.

"Saat ini kami masih menunggu jadwal resmi yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Kapan pelantikan (kepala daerah) untuk Pilkada serentak secara nasional ini akan

dilaksanakan," ucapnya.

Kemudian, Idham menjelaskan, tanggal 27 November 2024 murni untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pilkada. Proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 itu, tidak mempengaruhi penghitungan batas usia paslon kepala daerah.

"Hari pemungutan dan penghitungan suara itu ditetapkan pada tanggal 27 November 2024 pada hari Rabu. Penghitungan batas usia bakal pasangan calon kepala daerah itu, dihitung pada saat pelantikan," ujarnya.

Caleg Terpilih Harus Mundur

KPU juga menyatakan calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Pemilu 2024 yang maju Pilkada 2024 wajib mundur dari statusnya sebagai caleg terpilih. Surat kesediaan mundur itu wajib diserahkan pada saat mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah.

Aturan itu termuat dalam Pasal 32 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. PKPU tersebut resmi diundangkan hari ini, Selasa (2/7/2024).

"Iya, jadi yang bersangkutan itu sesuai Pasal 32, caleg terpilih baik DPR RI, DPD, DPRD terpilih itu wajib menyampaikan, menyerahkan surat pemberitahuan tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik.

"Kalau untuk parpol itu dia menyampaikan itu kepada parpol, parpol nanti sampaikan ke KPU. Disampaikan saat pendaftaran," sambungnya.

Jika caleg terpilih itu akan mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah, maka caleg itu harus mengirimkan surat kepada KPU yang berisikan kesediaannya mundur dari status caleg terpilihnya. Surat pengunduran diri itu dapat disampaikan paling lambat saat perbaikan dokumen.

"Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon," bunyi Pasal 32 ayat 3.

Sebagai informasi, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian dan verifikasi dokumen.

Kemudian setelahnya, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024. Sedangkan, pelantikan anggota DPR dan DPD akan digelar pada 1 Oktober 2024. (wid,rls,ant,tro/dya)

KLHK Verifikasi Proklamasi RW 2 Kebonsari DLH Kota Malang Optimistis Raih Tropi Utama



"Ini adalah agenda penilaian program Kampung Iklim yang dilakukan oleh KLHK. Saat ini kita berada di RW 2 Kebonsari Kecamatan Sukun. Selain verifikasi offline di RW 2 ini, ada juga tiga kampung iklim lainnya yang diverifikasi secara online,"



NOER RAHMAN WIDJAYA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang

MALANG - Tim verifikator dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penilaian Program Kampung Iklim (Proklamasi) di RW 2 Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Selasa (2/7/2024).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, optimistis dapat meraih Tropi Proklamasi Utama 2024.

"Ini adalah agenda penilaian program Kampung Iklim yang dilakukan oleh KLHK. Saat ini kita berada di RW 2 Kebonsari Kecamatan Sukun. Selain verifikasi offline di RW 2 ini, ada juga tiga kampung iklim lainnya yang diverifikasi secara online," ujar Rahman, ditemui di tengah kegiatan verifikasi tersebut.

Menurut Rahman, ini merupakan pertama kalinya Kota Malang mengajukan kampung untuk memperoleh Tropi Proklamasi Utama. Sebelumnya, menurutnya DLH Kota Malang sering mengajukan kampung untuk memperoleh sertifikat proklamasi, tidak untuk tropi.

Rahman berharap dengan diraihnya tropi Proklamasi Utama oleh RW 2 Kebonsari nanti, dapat menjadi

motivasi bagi masyarakat lainnya di Kota Malang untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan di wilayah masing-masing.

"Ini adalah tahapan paling tinggi. Mudah-mudahan beberapa wilayah lain bisa menyusul, seperti Arjowinangun RW 5, yang juga sudah siap," tambahnya.

Lebih lanjut, Rahman menjelaskan RW 2 Kebonsari dinilai unggul karena inovasi yang mereka lakukan, seperti urban smart farming, konservasi air melalui sumur resapan dan tempat tadah hujan, serta pemanfaatan karamba di sisi sungai.

"Jadi dalam kesempatan ini, DLH merupakan pengawas dan pendamping. Kegiatan ini murni dari inisiatif masyarakat yang kemudian didaftarkan ke KLHK," jelasnya.

Proklamasi sendiri merupakan konsep untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Di RW 2 Kebonsari, sambung Rahman, masyarakat telah



Tim verifikator dari KLHK saat meninjau Proklamasi di RW 2 Kebonsari, Kecamatan Sukun, Selasa (2/7/2024). (Santi/Lenteratoday)

melakukan berbagai upaya penanganan dampak perubahan iklim, seperti penanganan banjir melalui sumur resapan dan biopori, serta urban farming.

Diakhir, Rahman menyampaikan, dari total 500 kampung Proklamasi yang diverifikasi KLHK secara nasional, Kota Malang termasuk salah satu yang diunggulkan karena keberagaman inovasi yang dimiliki di setiap proklamasinya. (Santi/Dya)

DPRD Desak Pemkab Malang Segera Buat Aturan Pengolahan Limbah Domestik



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCCK) Kabupaten Malang saat melakukan monitoring Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di Kecamatan Wagir. (Dok. Dpkpciptakarya Kabupaten Malang)

MALANG - DPRD Kabupaten Malang mendorong Pemkab segera merumuskan regulasi terkait pengelolaan limbah domestik. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menegaskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pengolahan

limbah domestik yang sangat tinggi.

"Karena memang hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas lingkungan," ujar Darmadi, Selasa (2/7/2024).

Darmadi mengatakan di Kabupaten Malang, pengelolaan limbah domestik telah menjadi perhatian serius sejak beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Limbah Air Domestik dibawah naungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCCK), telah melakukan sejumlah program. Mencakup jambanisasi dan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara komunal di beberapa kecamatan Kabupaten Malang.

Namun, Darmadi mengakui bahwa program-program tersebut masih

belum berjalan optimal. Ia juga menekankan, pengelolaan limbah domestik tidak harus sepenuhnya ditangani oleh Pemkab Malang. Misalnya dengan kesadaran masyarakat atau pihak swasta untuk membangun TPS-3R dan TPS lainnya di lingkungan permukiman.

"Maka kalau prosesnya ini bisa dilakukan bersama-sama, maka saya yakin akan menghasilkan hal yang positif. Goalsnya nanti derajat kesehatan di Kabupaten Malang akan lebih optimal. Limbah domestik bisa berkurang maksimal," paparnya.

Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, menggarisbawahi pengelolaan air limbah domestik yang buruk dapat menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. "Kita perlu melestarikan sumber daya air dan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, regulasi yang dibentuk pemerintah nanti akan sangat penting," kata Sanusi.

Sanusi mengakui, penanganan limbah domestik di lapangan masih belum optimal. Maka, sambungnya, untuk mendukung pengelolaan limbah domestik yang lebih baik, Pemkab Malang akan menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana

di beberapa desa pada tahun 2024 ini.

"Jadi sudah dianggarkan untuk pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik. Berupa jamban keluarga di 6 desa, MCK di 9 desa, IPAL Komunal di 1 desa, dan tangki septik di 1 desa," rincinya. (Santi/Dya)



Karena memang hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas lingkungan,"



DARMADI

Ketua DPRD Kabupaten Malang



KISAH SRI RAHAYU, FOUNDER PEJUANG MIMPI, HADIRKAN HARAPAN DI TENGAH KETERBATASAN

SRI RAHAYU, perempuan kelahiran Malang tahun 1976 ini, merupakan sosok di balik berdirinya Pejuangmimpi.id. Sebuah komunitas yang menjadi wadah bagi individu-individu yang memiliki mimpi, namun terhadapan oleh keterbatasan.

Sri Rahayu menjelaskan, Pejuangmimpi lahir dari sebuah gagasan pada tahun 2020. Yang saat itu berada di bawah naungan Orami Parenting, sebuah platform yang berfokus pada peran Ibu dalam menerapkan pola asuh di keluarga.

Awalnya, komunitas ini menyediakan tempat bagi ibu-ibu yang menjadi orang tua tunggal, pejuang ekonomi keluarga, dan individu difabel untuk meraih impian mereka, meskipun terdapat kendala-kendala yang menghalangi.

"Tapi memang tidak semua orang itu bisa mewujudkan mimpinya. Karena ya ada keterbatasan itu baik ekonomi, informasi, fisik. Ada yang kaya, tapi dia tetap tidak bisa meraih mimpinya karena kurang tahu bagaimana menggunakan kekayaannya untuk meraih mimpi. Ada yang dia punya talenta tapi dia gak bisa mewujudkan mimpinya karena ada keterbatasan fisik, misalnya," ujar Sri Rahayu, saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (9/12/2023).

Dalam konteks tersebut, Sri Rahayu justru melihat potensi yang luar biasa terkandung dalam individu-individu difabel. Menurutnya, dibalik keterbatasan yang dimiliki, difabel mempunyai semangat dan ketahanan

yang menginspirasi. Yang ditegaskannya, menjadi suatu potensi yang kadang-kadang terlewatkan oleh masyarakat umum.

"Nah, di sinilah kami hadir menjadi jembatan mereka. Kami berkomitmen bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan bergandeng tangan. Karena gak bisa sendiri-sendiri, apalagi kalau kita bicara tentang anak-anak difabel," tuturnya.

Lebih lanjut, perjalanan Visi Pejuangmimpi, sambung Sri Rahayu, mulai terfokus pada isu kesehatan dan disabilitas. Menurutnya, hal ini didasari bahwa anak-anak difabel selalu terkait dengan gangguan kesehatan yang dimiliki.

Jika awalnya menaungi hampir seluruh "pejuang mimpi" di Indonesia melalui platform Orami Parenting. Mulai tahun 2023 ini, Sri Rahayu mengaku mulai memfokuskan program-program Pejuangmimpi di Kota Malang. Menandai komitmennya untuk membantu mereka yang membutuhkan di lingkungan lokal

terlebih dahulu.

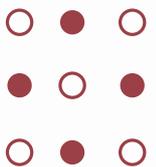
Sementara itu, komitmennya untuk mendirikan komunitas Pejuangmimpi ini. Juga dilatarbelakangi pengalaman pribadinya dalam menghadapi keterbatasan fisik sang anak, Faiz.

Sri mengatakan, sejak lahir, dokter telah mendiagnosa bahwa Faiz akan menghadapi banyak keterbatasan fisik, yang membuatnya merasakan kehancuran saat itu.

"Faiz difonis lumpuh dan belum bisa berjalan di usia 3 tahun. Saat itu saya berinisiatif untuk memasukkannya ke sekolah modeling.

Karena anak Down Syndrome itu justru gemar meniru. Biarkan saja dia di situ melihat, siapa tahu ada hasil baik. Dan dalam waktu tiga bulan setelah bergabung ke kelas modeling, Faiz bisa berjalan tanpa alat penyangga kaki," jelasnya.

Dari hal tersebut, Sri Rahayu belajar bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki Faiz, terdapat potensi yang tidak terduga. Melalui pengalaman dengan Faiz inilah, Sri Rahayu



menyadari bahwa anak-anak difabel memiliki semangat yang luar biasa untuk menaklukkan segala rintangan.

"Faiz bagi saya adalah guru yang mengajarkan saya bagaimana cara untuk sabar. Mengingat saya akan kebesaran Tuhan, dan segala pelajaran kehidupan lainnya," ungkap Sri Rahayu dengan penuh semangat.

Diakhir, pihaknya menegaskan bahwa Pejuangmimpi bukan hanya sekadar komunitas. Tetapi juga menjadi cerminan akan kekuatan dalam keterbatasan. Saat ini, disebutkannya sudah lebih dari 50 anak difabel serta orang tua dan pemerhati yang terlibat aktif dalam komunitas ini.

"Dari situlah saya percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang mustahil dan tidak ada keterbatasan yang mampu mengubur mimpi anak-anak ini. Makanya saya bangunlah pejuang mimpi ini," pungkasnya. (santi/nei)



REMAJA BERMENTAL BURUK RISIKO STROKE TIGA KALI LIPAT

REMAJA adalah kelompok individu yang paling rentan mengalami gangguan mental. Sebab, banyak faktor risiko pada remaja yang berpotensi memengaruhi kesehatan mental mereka.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres selama masa remaja antara lain keinginan besar untuk lebih mandiri, tekanan saat menyesuaikan diri dengan teman sebaya, serta peningkatan akses dan penggunaan teknologi.

Faktor penentu lainnya termasuk kondisi rumah tangga dan kekerasan seksual yang rentan menimpa para remaja.

Gangguan emosi umumnya muncul pada masa remaja. Selain depresi atau kecemasan, remaja dengan gangguan emosi bisa mengalami sifat mudah marah, frustrasi atau marah secara berlebihan. Selain gejala psikologis, gangguan emosi juga dapat menimbulkan gejala fisik, seperti sakit perut, sakit kepala, atau mual.

Gangguan emosional bisa sangat memengaruhi kinerja di sekolahnya. Jika tidak segera mendapatkan penanganan, remaja yang mengalami gangguan emosi dapat mengalami gejala lebih buruk, seperti mengisolasi diri hingga punya pikiran bunuh diri.

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa individu yang memiliki kemampuan mental buruk saat masa remaja dapat menghadapi risiko tiga kali lipat terkena stroke pada usia 50 tahun.

Ditulis laman Medical Daily, menurut hasil penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat, remaja dengan kemampuan berkonsentrasi, memecahkan masalah, dan belajar yang buruk memiliki risiko

lebih tinggi terkena stroke dini.

"Selain obesitas dan hipertensi pada remaja, fungsi kognitif yang lebih rendah mungkin menjadi faktor risiko timbulnya stroke dini," para peneliti menyimpulkan dalam studi tersebut.

Stroke, yang juga dikenal sebagai serangan otak, adalah keadaan darurat medis kardiovaskular yang terjadi secara tiba-tiba, di mana aliran darah ke otak terganggu, yang memengaruhi kemampuan bicara, makan, bergerak, dan fungsi tubuh lainnya.

Stroke dapat terjadi karena bekuan darah (stroke iskemik) atau pendarahan di jaringan otak (stroke hemoragik). Sekitar setengah dari pasien stroke mungkin mengalami gangguan jangka panjang.

Hasil penelitian mempunyai arti penting mengingat meningkatnya kejadian stroke di kalangan individu di bawah 50 tahun.

Tim peneliti menggunakan data dari sampel nasional yang mewakili 1,7 juta anak muda Israel yang menjalani tes fungsi kognitif komprehensif sebelum wajib militer. Studi tersebut memiliki data partisipan berusia antara 16-20 tahun, dari tahun 1987 hingga 2012.

Berdasarkan hasil tes kognitif, peserta dikelompokkan menjadi kelompok kecerdasan rendah (skor IQ di bawah 89), sedang (kisaran skor IQ: 89-118), atau tinggi (skor IQ di atas 118). Data peserta kemudian dihubungkan dengan Israel National Stroke Registry.

Sebanyak 908 kasus stroke tercatat selama periode penelitian, 767 di antaranya adalah stroke iskemik dan 141 karena pendarahan.

Angka kematian adalah 5 persen dan 62 persen kematian tersebut terjadi dalam waktu satu bulan setelah stroke.

Usia rata-rata stroke pertama berdasarkan penelitian itu adalah 39,5 tahun. Mereka yang memiliki skor kemampuan mental rendah hingga sedang, insiden kedua jenis stroke lebih tinggi, khususnya stroke iskemik.

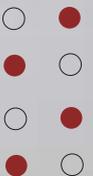
Mereka yang memiliki kemampuan mental rendah memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar untuk terserang stroke sebelum usia 50 tahun dibandingkan mereka yang memiliki skor tinggi, sementara mereka yang memiliki skor sedang memiliki kemungkinan 78 persen lebih besar untuk mengalami stroke.

Setelah memperhitungkan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi, risiko stroke hampir dua kali lipat di antara mereka yang memiliki kemampuan mental tingkat sedang dan lebih dari 3 kali lebih tinggi di antara mereka yang memiliki tingkat rendah pada masa remajanya.

Hasil penelitian itu memiliki beberapa keterbatasan, antara lain tidak mempertimbangkan faktor risiko lainnya seperti gaya hidup merokok, aktivitas fisik, pola makan, pendidikan tinggi dan berbagai faktor penentu sosial yang signifikan terhadap kesehatan (Antara/halodoc)



Selain obesitas dan hipertensi pada remaja, fungsi kognitif yang lebih rendah mungkin menjadi faktor risiko timbulnya stroke dini"



POTENSI KERUGIAN EKONOMI IMBAS PDNS DIRETAS BISA **CAPAI RP6,3 TRILIUN**

EKONOM memperkirakan kerugian ekonomi yang ditanggung Indonesia imbas sistem layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diretas bisa mencapai Rp6,3 triliun.

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa jika mengacu anggaran yang digelontorkan pemerintah senilai Rp700 miliar untuk pusat data nasional (PDN), maka semestinya bisa menghemat biaya pelayanan publik sebesar 50%.

Dengan demikian, sambung Huda, ada potensi penghematan sebesar hampir Rp1 triliun per hari. Nominal penghematan ini merupakan ongkos yang harus dikeluarkan untuk hilangnya manfaat pelayanan secara digital per harinya.

Di samping itu, tambah Huda, layanan imigrasi juga mengeluarkan biaya pengalihan cloud ke Amazon. Dia pun memperkirakan ada biaya kehilangan dari pelepasan data.

"Saya kalikan dengan multiplier effect, maka kerugian ekonomi sekitar Rp6,3 triliun [imbas PDNS 2 diretas]," kata Huda mengutip Bisnis, Senin (1/7/2024).

Huda menjelaskan bahwa kerugian waktu yang ditimbulkan tidak dihitung sebagai biaya yang dikeluarkan masyarakat yang diperkirakan akan cukup besar.

Selain itu, Huda menyampaikan bahwa biaya untuk menunggu paspor yang lebih lama, ataupun waktu pelayanan publik yang suatu saat nanti pasti akan terdampak dari terkuncinya data di PDNS.

Meski demikian, menurut Huda, tumbangnya PDNS 2 imbas diserang



hacker tidak ada kaitannya dengan judi online yang tengah diperangi oleh pemerintah.

Huda menilai bahwa sifat ransomware yang harus masuk terlebih dahulu ke sistem server nampaknya terlalu mudah jika hanya orang luar di sistem PDNS yang terlibat.

"Saya menduga ada kelalaian manusia [human error] dalam kasus ini. Apakah orang tersebut terduga terafiliasi judi online? Bisa jadi. Tapi lebih bahaya jika ada tendensi yang lebih besar dari itu," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap per 26 Juni 2024, sebanyak 84,75% instansi pengguna terdampak imbas sistem layanan PDNS 2 yang mengalami gangguan sejak 20 Juni 2024.

Menteri Komunikasi dan

Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa 84,75% itu setara dengan 239 instansi pengguna yang terdampak.

"Layanan PDNS 2 per 26 Juni 2024, instansi yang terdampak ada 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota. Total ada 239 yang terdampak," dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kemenkominfo dan BSSN di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Di sisi lain, instansi pengguna yang tidak terdampak karena daya tersimpan di PDNS 2 terdiri atas 21 kementerian/lembaga, 1 provinsi, 18 kabupaten, dan 3 kota. Totalnya hanya ada 43 instansi pengguna yang layanannya tidak terdampak dari server PDNS 2 yang down.

Kemenkominfo mengungkapkan bahwa instansi pengguna yang berhasil recovery layanan terdiri atas

lima layanan. Perinciannya, Kemenkomarves (layanan perizinan event), Kemenkumham (layanan keimigrasian), LKPP (layanan SIKAP), Kemenag (SIHALAL), dan Kota Kediri (ASN Digital).

Dalam kesempatan yang sama, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut bahwa hanya 2% data yang ter-backup imbas sistem layanan PDNS 2 yang lumpuh pada 20 Juni 2024.

Kepala BSSN Hinsu Siburian mengakui kebenaran bahwa negara lain lebih cepat melakukan pemulihan data karena dimungkinkan memiliki Disaster Recovery Center (DRC).

"Kita kan tidak ada backup-nya. Itu yang sebenarnya fatal yang kami lihat dari data center ini, jadi dia tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis sama seperti di Surabaya," kata Hinsu.

Jawaban Hinsu diinterupsi oleh Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno yang menyebut bahwa tidak adanya backup data merupakan kondisi yang mengecewakan. Padahal, kata dia, pembangunan PDNS 2 tidak membutuhkan 1-2 hari, melainkan direncanakan sudah bertahun-tahun.

Sidang ini makin menarik saat pimpinan rapat sidang Ketua Komisi I DPR Meutya Viafa Hafid menginterupsi sekaligus mengoreksi pernyataan Kepala BSSN yang menyebut persoalan data center adalah tata kelola, melainkan kebodohan.

"Maksudnya, Pak. Kalau nggak ada backup itu bukan tata kelola, Pak. Berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja, sih, Pak," kata Meutya. (Lenteratoday)



PAPARAN CAHAYA TERANG

DI MALAM HARI BERISIKO TERKENA DIABETES

SESEORANG yang banyak terkena paparan cahaya terang seperti dari gawai di malam hari, dapat berisiko lebih tinggi terkena penyakit diabetes tipe 2 menurut sebuah penelitian terbaru.

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Medical Daily pada Sabtu (29/6), melalui sebuah penelitian yang melibatkan sebanyak 85 ribu orang dewasa sehat tanpa diabetes, peneliti dari Universitas Flinders Australia menemukan bahwa paparan cahaya antara pukul 00.30 dini hari dan 06.00 pagi dapat meningkatkan risiko terkena diabetes sebesar 67 persen.

Lewat jurnal The Lancet Regional Health, para peneliti juga menuliskan bahwa risiko diabetes tipe 2 lebih tinggi pada orang yang terpapar cahaya malam yang lebih terang dan pada orang yang terpapar pola cahaya yang dapat mengganggu ritme sirkadian.

"Menghindari cahaya di malam hari dapat menjadi rekomendasi sederhana dan hemat biaya yang dapat mengurangi risiko diabetes, bahkan dalam kondisi yang buruk, mereka yang memiliki risiko genetik tinggi," tulis para peneliti. Peneliti melanjutkan paparan cahaya yang ditangkap melalui perangkat yang dikenakan di pergelangan tangan dan

berisi sensor cahaya fotodiode silikon dengan panjang gelombang sensitivitas puncak 560 nm.

"Paparan cahaya malam dan risiko genetik ditemukan menjadi faktor risiko independen untuk mengembangkan diabetes tipe 2," kata peneliti.

Lebih lanjut saat dihubungkan dengan terganggunya ritme sirkadian tubuh yang dapat mengganggu beberapa fungsi tubuh, mereka turut menemukan bahwa paparan cahaya menyebabkan perubahan sekresi insulin dan metabolisme glukosa.

"Perubahan sekresi insulin dan metabolisme glukosa yang disebabkan oleh ritme sirkadian yang terganggu memengaruhi kemampuan tubuh dalam mengatur kadar gula darah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perkembangan diabetes tipe 2," kata penulis senior Andrew Philips.

Walaupun para peneliti menemukan sejumlah hal penting tersebut, namun mereka mengklaim bahwa penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan tertentu seperti tidak dapat mengeksplorasi dampak waktu makan karena kurangnya data pola makan sementara.

Waktu makan juga dinilai dapat memengaruhi ritme sirkadian manusia, memengaruhi toleransi glukosa dan kadar lemak tubuh, serta berpotensi memengaruhi hubungan antara paparan cahaya, gangguan sirkadian, dan diabetes.

Sebab, peserta dalam kelompok ini memiliki usia rata-rata 62,3 tahun, masih belum pasti apakah temuan ini dapat diterapkan pada kelompok usia yang lebih muda.

Namun berdasarkan temuan mereka, para peneliti menyarankan masyarakat untuk mengurangi paparan cahaya di malam hari dan menjaga lingkungan gelap mungkin merupakan cara yang mudah dan murah untuk mencegah atau menunda perkembangan diabetes.

Sehat tanpa penerangan

Dilansir dari Healthline, disebutkan kalau tidur dengan penerangan alias lampu menyala akan mempersulit otak untuk beristirahat serta mendapatkan tidur yang lelap. Ini dikarenakan paparan cahaya menghambat produksi melatonin yang berfungsi untuk merangsang tidur.

Mengutip halodoc, American Medical Association mengatakan gangguan siklus tidur akibat

penerangan tidur malam dapat meningkatkan risiko kesehatan mulai dari depresi, kanker, masalah reproduksi, sampai obesitas. Inilah penjelasan kenapa tidur malam tanpa penerangan lebih direkomendasikan.

Paparan Cahaya dan Siklus Tubuh Menurut Drake, PhD, peneliti mengenai tidur dari Henry Ford Hospital di Detroit, mengatakan kalau irama dasar tubuh manusia termasuk siklus tidur dan bangun erat kaitannya dengan paparan cahaya.

Biasanya tubuh memproduksi hormon melatonin (sebagai pengantar tidur) yang mempersiapkan diri untuk tidur.

Pencahayaan menekan melatonin di mana cahaya terang di malam hari mendorong siklus tidur dan setengah jam lebih awal. Ini membuat Anda bisa mengantuk lebih awal di malam selanjutnya.

Di sisi lain, cahaya terang di pagi hari, memajukan siklus tidur sehingga membuat kamu ingin tidur lebih cepat pada malam harinya.

Paparan cahaya ini pada akhirnya membuat kebiasaan tidur yang kacau. Hasil akhirnya adalah siklus bangun tidur yang tidak teratur yang berdampak pada kesehatan yang buruk (Antara/halodoc)

Menanti Janji ... (dari Hal 1)

PEMBUAT ransomware Brain Cipher menjanjikan akan membebaskan data dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang mereka sandera dari pemerintah.

Dalam postingannya, mereka berharap pemerintah sadar kalau pentingnya keamanan siber dan merekrut ahli yang berkualifikasi untuk mengurus PDN.

"Hari Rabu kami akan memberikan kuncinya secara gratis. Kami berharap serangan kami membuat anda sadar pentingnya untuk mendanai industri ini dan merekrut ahli yang punya kualifikasi," tulis mereka.

"Serangan kami tidak melibatkan isu politik, dan murni merupakan ransomware yang meminta tebusan seperti biasanya," lanjut tulisan Brain Chiper.

Hacker mengklaim secara cuma-cuma memberikan kunci gratis untuk membuka data PDNS yang tak bisa diakses. Jika tidak berkenan menyampaikan terima kasih, peretas bilang pemerintah bisa menyampai-kannya secara privat.

Peretas tidak lagi menuntut tebusan US\$ 8 juta dollar seperti sebelumnya.

Kendati begitu, dalam pengumuman yang diunggah di situs web gelap (dark web) tersebut, hacker Brain Chiper juga membuka donasi bila terdapat pihak yang ingin memberikan sumbangan. "Kami menyediakan dompet monero untuk donasi, kami harap mendapatkan sumbangan Rabu nanti," kata pihak Brain Cipher.

Meski membuka donasi, Brain Cipher menegaskan bahwa mereka tetap akan memberikan kunci secara gratis atas mereka inisiatif sendiri. "Kami berharap pada hari Rabu kami bisa mendapatkan sesuatu. Dan kami ulangi lagi: kami akan memberikan kuncinya secara gratis dan atas inisiatif kami sendiri," tulis kelompok peretas tersebut.

PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data.

Pusat Data Nasional mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.

Pemerintah mengidentifikasi pelaku atau hacker terhadap PDN sebagai non-state actor.

Terpisah, Pakar siber Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, Robin Syihab, menduga pelakunya orang Indonesia.

"Saya tidak berani berspekulasi, tapi melihat sejarahnya LockBit ada kemungkinan pelakunya orang dalam Indonesia sendiri," kata Robin yang merupakan pembuat antivirus ANSAV, Selasa (2/7/2024).

Brain Cipher menggunakan

LockBit 3.0 builder untuk menciptakan ransomware mereka sendiri. Pada Mei 2023, geng LockBit juga mengklaim menyerang sistem Bank Syariah Indonesia (BSI) dan mencuri 15 juta data penggunanya.

Kecurigaan Robin ini juga diungkapkan di akun medsosnya. "Saya justru curiga pelakunya orang dalam atau orang Indonesia sendiri, kok bisa? Selama saya mempelajari malware, operator ransomware itu terkenal kejam dan darah dingin, lihat Conti yang pernah ngeransom rumah sakit, LockBit dan Conti itu 11-12. Yang masih punya empati itu orang Indonesia," ujarnya.

"Tapi malwarenya, kan, varian LockBit, jangan salah, untuk buat ransomware sekelas LockBit sekarang sangat mudah, ada toolnya tersedia secara bebas dan siapa pun bisa membuatnya secara inhouse, saya bisa demokan cara buatnya kalau diperlukan," lanjutnya.

Hati-hati Dikelabui

Pemerintah diimbau untuk tidak langsung percaya terhadap pesan dari peretas Pusat Data Nasional (PDN) yang menyatakan bakal memberikan kunci untuk memulihkan data terdampak ransomware. Pengamat keamanan siber dari vaksin.com, Alfons Tanujaya menyampaikan bahwa pihaknya sudah menelusuri kebenaran pesan tersebut.

Hasilnya, pesan itu memang disampaikan oleh kelompok peretas bernama Brain Cipher. Brain Cipher mengeluarkan statement di situsnya yang bisa kita akses. Itu situs resminya kami sudah cek itu benar. Lalu dia bilang dia akan melepas memberikan kunci dekripsi yang dilakukan untuk mengenkripsi PDN Rabu ini," ujar Alfons.

Namun, kata Alfons, tidak ada kepastian bahwa pihak peretas akan memulihkan data di PDN pada Rabu (3/7/2024).

Sebab, peretas tak memberikan keterangan waktu dan tanggal pemberian kunci tersebut. Alfons justru menemukan adanya countdown atau hitungan mundur 3.105 hari di situs tersebut. Menurut

dia, hitungan mundur itu patut diduga sebagai waktu bagi peretas untuk memulihkan data yang diretas.

"Jadi harus hati-hati, jangan mudah dikelabui oleh janji palsu. Dia bilang this wednesday artinya Rabu ini. Rabu ini tuh Rabunya orang Jawa, atau Rabunya besok benaran? Dia enggak kasih tanggal," kata Alfons.

"Kecuali dia bilang this Wednesday, July 3 2024 itu baru kita bisa percaya, dia akan rilis Rabu. terus di depannya ada 3.105 hari. Jadi kalau 3.105 hari itu, dibagi setahun 365 hari kira-kira 8,5 tahun lagi. Mungkin Rabu 8,5 tahun lagi dia akan merilis," ucap dia.

Di samping itu, pihak peretas juga memberikan akun dompet digital Monero untuk mengirimkan donasi di laman resminya. "Dia tinggalkan akun Moneronya, nanti ada kita bisa nyumbang. Kenapa dia pakai Monero? karena itu termasuk akun bitcoin yang sulit dilacak siapa pemiliknya," kata Alfons.

Warganet juga heboh. Pegiat media sosial, Denny Siregar, mengaku heran. Dia menyebut baru pertama kali mendapati ada hacker minta maaf.

"Baru kali ini gua denger ada hacker minta maaf. Jangan2 ini hacker domestik...," tulis Denny Siregar, dikutip dari akun @Dennysiregar7.

Publik pun banyak yang sepemikiran dengan pria yang telah membantu memenangkan Jokowi dua periode itu.

"Palingan cuma settingan biar Kominfo dikasi anggaran tambahan buat benahin sistemnya," tulis warganet di kolom komentar.

"Jangan2 ... Suruhan Biar Anggaran Turun lajee," tambah lainnya.

"Mungkin Hacker piaraan Kemeninfo kale buat pencucian duit biar gak terlalu clear terlihat KORUPSI...," celoteh lainnya

"mo hilangkan berkas.. bakar ktrnya. mo hilangkan jejak digital, sewa hacker. pantesan mukidi tenang2 saja," tandas warganet lainnya.

Data Kominfo di Pasar Gelap

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga men-

jadi korban kebocoran data. Sejumlah data kementerian, mulai dari data NIK hingga akun bank diretas dan dijual di situs 'gelap' BreachForums.

Dugaan peretasan tersebut diungkap oleh akun yang rutin mempublikasikan bocoran-bocoran data, @FalconFeedsio. Ia mengunggah narasi soal peretasan serta tangkapan layar dari Breachforums.

Unggahan ini menyebut data-data Kominfo periode 2021 hingga 2024 yang didapatkan dari Pusat Data Nasional (PDN) tersebut dijual dengan harga US\$121 ribu atau sekitar Rp1,98 miliar.

"Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia untuk Dijual," tulis akun aptikakominfo tersebut.

"Data pribadi, sistem keamanan lisensi perangkat lunak, dan dokumen kontrak dari Pusat Data Nasional (PDN) dari tahun 2021 hingga 2024 dijual dengan harga US\$121.000," tambahna.

Akun tersebut juga mengatakan penjahat siber yang membuat unggahan di Breachforum melampirkan data sampel yang mencakup informasi lisensi perangkat lunak, Nomor Induk Karyawan, hingga rincian akun bank.

Unggahan di BreachForums itu berbahasa Inggris. Namun, beberapa istilah masih memakai kata-kata lokal, contohnya, 'personalia', 'lisensi', 'kontraktual', hingga 'pusat data nasional' sebagai penjelasan dari PDN.

Tidak diketahui apakah data yang diklaim milik Kominfo ini berkaitan dengan insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang beberapa waktu lalu mengalami serangan ransomware.

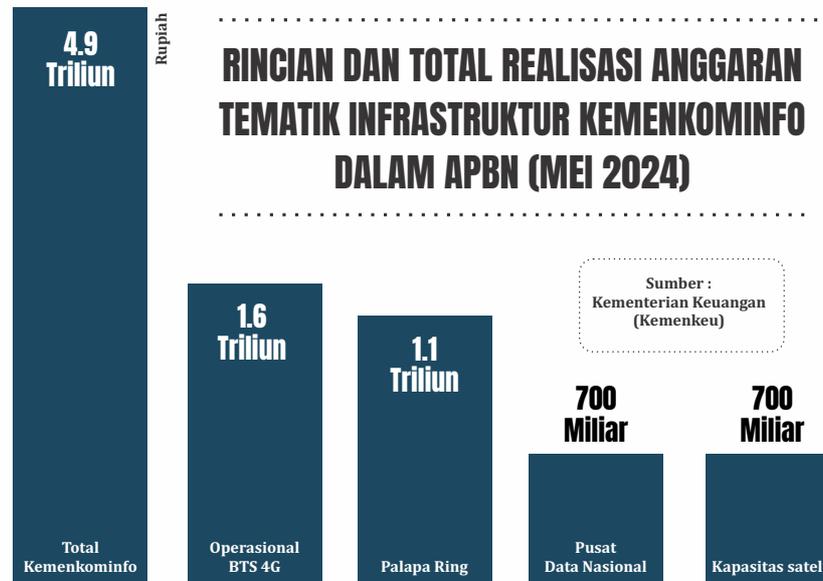
Alfons Tanujaya pun membeberkan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan pengelola data agar kejadian serupa tak terjadi lagi di masa yang akan datang.

"Satu-satunya cara adalah kita menerapkan standar keamanan yang baik dan benar. (Standar) itu mudah dicari, misalnya ISO 270001 ada, mau cari standar pengamanan ransomware ada," kata Alfons, ditemui di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

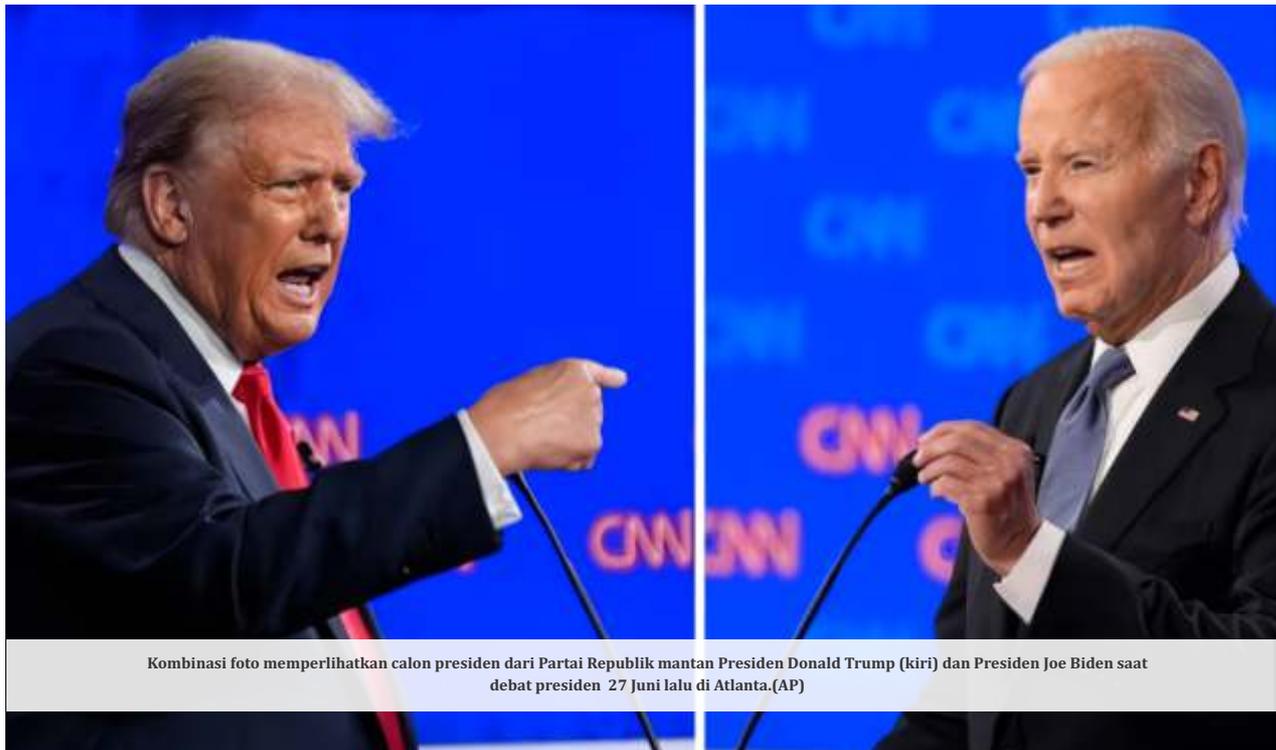
Menurutnya, yang sulit dalam mengelola data bukan bagaimana standar keamanannya tetapi bagaimana menjalankan standar keamanan siber itu dengan konsisten. Ia bahkan mengibaratkan penerapan standar keamanan layaknya seseorang yang tengah berdiet, semuanya harus konsisten dan tak boleh dilanggar.

"Sama seperti keamanan siber, perlu mengubah kebiasaan. Kalau mau aman itu harus ubah bagaimana cara kita memandang data. Admin harus mengubah cara pandang, dalam mengelola data," tuturnya. Alfons memandang sejauh ini permasalahan di pemerintah adalah sifat tender proyek, termasuk tender soal keamanan data, yang memiliki jangka waktu.

"Khusus di pemerintahan yang kebanyakan berbasis proyek, kalau sudah dapat proyek, sudah selesai, ditinggal. Padahal, security itu adalah komitmen jangka panjang yang harus dijaga terus, perlu di-maintain," ia menuturkan. (wid,tro,rls,ist/dya)



MA Amerika Serikat Putuskan Trump 'Kebal' Hukum, Biden Murka



Kombinasi foto memperlihatkan calon presiden dari Partai Republik mantan Presiden Donald Trump (kiri) dan Presiden Joe Biden saat debat presiden 27 Juni lalu di Atlanta. (AP)

WASHINGTON - Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) membuat keputusan mengejutkan. Mantan Presiden AS Donald Trump dinyatakan memiliki kekebalan dari penuntutan untuk tindakan resminya saat menjabat.

Hal itu membuat Presiden AS saat ini, Joe Biden murka. Biden mengatakan bahwa keputusan ini bisa menjadi preseden berbahaya yang akan dieksploitasi oleh Donald Trump jika dia terpilih kembali menjadi presiden pada bulan November.

Mahkamah Agung yang didominasi oleh konservatif memutuskan bahwa Trump, dan semua presiden, menikmati "kekebalan absolut" dari penuntutan pidana untuk "tindakan resmi" yang dilakukan selama menjabat. Namun, mereka tetap dapat menghadapi hukuman pidana untuk "tindakan tidak resmi."

"Secara praktis, keputusan hari ini hampir pasti berarti tidak ada batasan atas apa yang dapat dilakukan oleh seorang presiden. Ini adalah prinsip baru yang mendasar, dan ini adalah preseden yang berbahaya," ujar Biden dalam pidatonya di Gedung Putih, dilansir AFP, Selasa (2/7/2024).

"Rakyat Amerika harus memutuskan apakah mereka ingin mempercayakan kembali kepresidenan kepada Donald Trump, sekarang dengan mengetahui bahwa dia akan semakin berani melakukan apa pun yang dia inginkan, kapan pun dia ingin melakukannya," tambah Biden.

Ketua MA John Roberts mengatakan berdasarkan struktur konstitu-

sional AS tentang kekuasaan yang terpisah, sifat kekuasaan presidensial memberikan hak kepada mantan presiden untuk mendapatkan kekebalan absolut dari penuntutan pidana atas tindakan dalam kewenangan konstitusionalnya yang konklusif dan preklusif.

"Dan dia berhak atas setidaknya kekebalan praduga dari penuntutan atas semua tindakan resminya. Tidak ada kekebalan untuk tindakan tidak resmi," ujarnya, seperti dikutip Associated Press.

Keputusan MA tersebut membuat Trump memiliki kekebalan untuk memperpanjang penundaan dalam kasus pidana yang sedang berjalan terhadapnya, serta mengakhiri prospek bahwa mantan presiden tersebut dapat diadili sebelum pemilihan umum November 2024 mendatang.

Dalam putusan bersejarah 6-3, mayoritas konservatif pengadilan, termasuk tiga hakim yang ditunjuk oleh Trump, mempersempit kasus terhadapnya dan mengembalikannya ke pengadilan tingkat pertama untuk menentukan dakwaan sisa dari penasihat khusus Jack Smith.

Meski begitu, Ketua MA menegaskan bahwa presiden "tidak kebal hukum." Namun dalam perbedaan pendapat yang berapi-api untuk tiga hakim liberal di pengadilan tersebut, Hakim Sonia Sotomayor menulis, "Dalam setiap penggunaan kekuasaan resmi, Presiden sekarang adalah raja di atas hukum."

Membacakan pendapatnya di ruang sidang, Sotomayor berkata,

"Karena Konstitusi kita tidak melindungi mantan presiden dari tanggung jawab atas tindakan kriminal dan pengkhianatan, saya tidak setuju."

Sotomayor mengatakan keputusan tersebut "mengolok-olok prinsip, yang menjadi dasar Konstitusi dan sistem pemerintahan kita, bahwa tidak ada orang yang kebal hukum."

Perlindungan yang diberikan pengadilan kepada presiden, katanya, "sama buruknya dengan kedengarannya, dan tidak berdasar."

Trump merayakan kemenangan besarnya di media sosial X. "KEMENANGAN BESAR BAGI KONSTITUSI DAN DEMOKRASI KITA. BANGGA MENJADI ORANG AMERIKA!" tulis Trump, tak lama setelah keputusan tersebut dirilis.

Hasil Survei Usai Debat Perdana

Di sisi lain, sejumlah lembaga merilis hasil survei Joe Biden dan Donald Trump terkini. Hasil survei terbaru Biden vs Trump dirilis usai debat pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 perdana.

Hasil survei terbaru Biden vs Trump menunjukkan bahwa meskipun Trump dinilai tampil lebih baik dalam debat perdana. Meskipun tampil lebih baik, elektabilitas Trump tidak menunjukkan keunggulan yang signifikan atas Biden.

Persepsi negatif terhadap usia dan kesehatan Biden menjadi isu utama dalam survei pascadebat perdana. Terlepas dari itu, isu usia Biden tidak cukup untuk mengurangi dukungan terhadapnya secara signifikan.



RANGKUMAN HASIL SURVEI TERBARU BIDEN VS TRUMP SETELAH DEBAT PILPRES AS 2024 PERDANA:

1. Hasil survei menurut Ipsos

- Persentase pemilih yang mempertimbangkan Biden tetap stabil, dari 44 persen sebelum debat menjadi 46 persen setelah debat. Persentase yang mempertimbangkan Trump juga tetap, yakni 44 persen sebelum dan sesudah debat.

- Sebelum debat, 27 persen pemilih potensial menilai kelayakan mental Biden sebagai baik atau sangat baik. Setelah debat, angka ini turun menjadi 20 persen.

- Survei dari segi mental, Trump berhasil meraih 39 persen sebelum debat dan 41 persen setelah debat. Sementara itu, hasil survei penilaian fisik, Trump meraih 43 persen sebelum debat dan 45 persen setelah debat.

2. Hasil survei menurut Data for Progress

- Sebanyak 62 persen pemilih yang menonton atau membaca tentang debat mengatakan Trump menang, sedangkan 30 persen mengatakan Biden menang.

- Hal ini juga terkait dengan temuan sebanyak 67 persen pemilih merasa Biden terlalu tua untuk menjadi presiden, sementara 35 persen mengatakan hal yang sama tentang Trump.

- Di sisi lain, 42 persen lebih khawatir tentang tuduhan kriminal dan ancaman terhadap demokrasi dari Trump. Trump memiliki keunggulan +14 poin dibandingkan Biden dalam hal "layak memimpin negara." Tetapi, keunggulan ini menyusut menjadi hanya 3 poin ketika dibandingkan dengan Kamala Harris.

Secara umum, survei Ipsos dan Data for Progress menunjukkan bahwa meskipun ada kekhawatiran terhadap Biden, pemilih masih terpecah dalam menentukan siapa yang lebih layak memimpin AS di periode mendatang.

Diketahui, saat membahas topik ini, Biden dan Trump saling adu argumen dan bahkan saling serang secara personal. Trump menyerang Biden dengan menyebutnya sebagai "orang Palestina yang buruk", usai Biden menegaskan dukungannya untuk Israel dalam konflik melawan Hamas di Gaza.

Trump juga menuduh Biden dan Partai Demokrat mendukung aborsi bahkan pada bulan ke-9 kehamilan. Hal ini dibantah oleh Biden dengan menyebut Trump telah berbohong.

Di sisi lain, sorotan utama debat Pilpres AS 2024 juga tertuju pada usia Biden. Saat debat, suara Biden terdengar serak, sulit dimengerti, dan terbata-bata. Biden juga tidak bisa meningkatkan volume suaranya saat menjelaskan hal-hal penting. (afp, rtr,ist/dya)